

PERAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ODGJ DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

The Role of the Social Rehabilitation Division of the Social Affairs Office in Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Tanjungpinang City in 2024

Lesna Willy Helmi Laia^{1*}

Kustiawan²

Yani Mulitsih Pramukti³

^{*1-3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*email:

lesnawillyhelmilaia@gmail.com

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Dalam sebuah negara ada Undang-Undang yang mengatur perencanaan dalam masyarakat salah satunya pelayanan terhadap warga yang kehidupannya jauh dari segi kelayakan. Dalam hal ini pemerintah mendirikan satu organisasi kedinasan yaitu dinas sosial yang di dalamnya memiliki bidang rehabilitasi sosial yang berperan dalam pelayanan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan apa yang menjadi peran bidang rehabilitasi sosial kota Tanjungpinang dalam menangani ODGJ khususnya di kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pemilihan informan secara teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan menemukan bahwa ada beberapa yang menjadi peran bidang rehabilitasi sosial dalam menangani ODGJ khususnya di Kota Tanjungpinang ada tiga hal yakni ;1) peran aktif; 2) peran partisipasi; 3) peran pasif. Ketiga hal diatas memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UUD yang berlaku.

Kata Kunci:

Peran, Rehabilitasi Sosial, ODGJ

Keywords:

Role, Social Rehabilitation, With Mental Disorders (ODGJ)

Abstract

In a country there is a law that regulates planning in society, one of which is service to citizens whose lives are far from feasible. In this case, the government established an official organization, namely a social service which includes the field of social rehabilitation which plays a role in the services above. Therefore, this research was conducted by researchers to describe what role the field of social rehabilitation in the city of Tanjungpinang plays in dealing with ODGJ, especially in the city of Tanjungpinang. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach by selecting informants using purposive sampling techniques. Data collection was carried out through interviews and documentation. Based on the results of research in the field, it was found that there are several roles in the field of social rehabilitation in handling ODGJ, especially in Tanjungpinang City, there are three things, namely ; 1) active role; 2) participation role; 3) passive role. The three things above have different functions in accordance with the regulations stated in the applicable Constitution.

Submit Tgl.: 28-Juni-2026	Diterima Tgl.: 29-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 30-Juni-2026
---------------------------	-----------------------------	--------------------------------

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan sosial adalah hak konstitusional bagi seluruh warga negara termasuk di dalamnya golongan masyarakat rentan dan penyandang disabilitas mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Secara umum fungsi pemerintahan meliputi tiga fungsi pokok yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (H. Nurul Aini dalam Haryanto dkk, 1997:36-37) yaitu fungsi pelayanan (service), fungsi pembangunan (development), dan fungsi perlindungan

(protection). Pemerintah wajib hadir sebagai pengatur sekaligus pelaksana untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang terabaikan hak-hak dasarnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa negara wajib menyelenggarakan kesejahteraan merupakan usaha yang berfokus, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat melalui pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan fundamental setiap individu, termasuk pemulihan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial.

Memasuki era otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ialah urusan sosial. Dengan demikian pemerintah daerah diberikan wewenang penuh sekaligus tanggung jawab mutlak untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial di wilayahnya masing-masing.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada Teori Fungsi Pelayanan Publik dalam Ilmu Pemerintahan. Pemerintahan yang baik (good governance) diukur dari bagaimana birokrasi lokal mampu menerjemahkan kebijakan besar menjadi pelayanan nyata yang cepat dan terbuka. Gangguan Jiwa merupakan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. Penanganan diartikan sebagai tahap, perbuatan, metode, menangani atau tindakan menangani sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan adalah sebuah penyelesaian pekerjaan (Abdullah, Y. A. (2021).

stigma bahwa ODGJ merupakan orang gila harus dihilangkan karena dapat memperburuk kondisi ODGJ (Wahyuni, dkk (2021). ODGJ bukan sekadar masalah medis/kesehatan, melainkan juga masalah sosial kompleks yang mencakup penelantaran, stigma, pasung, hingga hilangnya hak keberfungsian sosial mereka di tengah masyarakat. Gangguan Jiwa merupakan permasalahan yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang cepat. stigma bahwa ODGJ merupakan orang gila harus dihilangkan karena dapat memperburuk kondisi ODGJ.

Pada tataran empiris di Kota Tanjungpinang, fenomena keberadaan ODGJ masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terselesaikan hingga tahun 2024. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, dinamika urbanisasi dan tekanan sosio-ekonomi berpotensi meningkatkan angka gangguan jiwa di masyarakat. Dilansir dari KEPRI INFO Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tanjungpinang mencatat 400 ODGJ sampai tahun 2024. ODGJ tersebut ada yang terlantar dan ada yang memiliki keluarga. Di lapangan, seringkali masih ditemukan ODGJ terlantar di jalanan protokol, adanya laporan tindakan pasung oleh keluarga karena keterbatasan ekonomi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai penanganan ODGJ yang humanis.

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, khususnya Bidang Rehabilitasi Sosial, merupakan garda terdepan kolektif pemerintah daerah yang memegang mandat regulasi ini. Peran mereka meliputi proses pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan keberfungsian sosial, hingga reintegrasi mantan ODGJ kembali ke dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya di tahun 2024 Bidang Rehabilitasi Sosial dihadapkan pada berbagai hambatan struktural maupun teknis, seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan kapasitas panti/rumah singgah, minimnya rasio Pekerja Sosial (Peksos) profesional, hingga lemahnya koordinasi lintas sektor (misalnya dengan Dinas Kesehatan atau Satpol PP).

Terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terdeteksi di kota Tanjungpinang. Inilah yang menimbulkan kebutuhan penelitian ini. Mengkaji peran Bidang Rehabilitasi Sosial tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mengevaluasi seberapa besar kapabilitas organisasi pemerintah (administrative capability) dan efisiensi birokrasi dalam melaksanakan fungsi perlindungan sosial. (Dwiyanto 2015) Kegiatan pelayanan akan menjadi lebih efisien tanggap dan akuntabel apabila melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan. Apabila peran ini tidak dianalisis dan ditingkatkan, maka sasaran otonomi daerah untuk

mempermudah pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tidak akan tercapai pada aspek penanganan kelompok rentan. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang bagaimana Bidang Rehabilitasi Sosial mendefinisikan perannya, mengatasi tantangan, dan bekerja sama dalam menangani ODGJ di Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 sangat relevan, tepat, dan mendesak untuk diteliti demi memberikan kontribusi akademis bagi ilmu pemerintahan serta saran praktis bagi para pengambil kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Zizi (2023) menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan dalam penanganan ODGJ terlantar melalui kegiatan pendataan, penjangkauan, koordinasi dengan instansi terkait, rehabilitasi sosial, serta pemulangan dan pendampingan ODGJ. Keberhasilan penanganan ODGJ memerlukan kerja sama antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, keluarga, dan masyarakat.
2. Bangsu (2022) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pelayanan sosial bagi ODGJ dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan yang sering ditemukan adalah keterbatasan tenaga kerja, anggaran, serta belum optimalnya prosedur pelayanan.
3. Karvallo, Rochim, dan Ismail (2025) menyatakan bahwa program rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh koordinasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Namun, keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala utama. Berdasarkan penelitian terdahulu, peran Bidang Rehabilitasi Sosial sangat penting dalam menangani ODGJ. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana peran Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam menangani ODGJ tahun 2024 serta faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif yang menekankan pada proses analisis. (Sugiono dalam Tenri, A. (2021) mengatakan metode penelitian kualitatif merupakan cara penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada situasi objek yang murni dimana penelitian merupakan sebuah instrumen kecil. Jenis penelitian ini berorientasi pada upaya menemukan dan mengungkap suatu peristiwa/fenomena. Pendekatan kualitatif deskriptif membantu peneliti menjelaskan, menggambarkan secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini menelusuri dan menyajikan gambaran komprehensif tentang permasalahan tanpa mengubah fokus penelitian.

Menurut Sugiyono (2020) objek penelitian merupakan entitas atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Objek penelitian ini adalah kepala bidang rehabilitasi sosial, pelaksana lapangan dan masyarakat sekitar, penelitian ini dilakukan di Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitiannya mengkaji peran dinas sosial khususnya bidang rehabilitasi sosial dalam menangani Odgj di kota Tanjungpinang. Sumber data utama pada penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui instrumen seperti observasi, wawancara, catatan lapangan, serta pemanfaatan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan atau pihak yang menjadi sumber utama melalui proses wawancara. Sementara, Sumber data sekunder merupakan data pendukung bagi data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, serta arsip tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.

Menurut Winarni, E. W. (2021) pengumpulan data merupakan tahap paling krusial dalam penelitian karena menjadi inti dari proses memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama,

yang dilakukan melalui komunikasi lisan dan interaksi langsung baik tatap muka maupun via media digital antara peneliti dan informan guna menggali informasi mendalam mengenai fakta, opini, pengalaman, serta perspektif subjek yang diteliti. Sebagai pelengkap, metode dokumentasi atau studi dokumen juga diterapkan melalui evaluasi terhadap arsip, catatan, gambar, dan materi relevan lainnya untuk mengisi celah informasi, memvalidasi data wawancara, serta menyediakan data historis dan kontekstual yang komprehensif.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, suatu proses terencana untuk keteraturan, menjabarkan, dan menemukan makna mendalam dari data wawancara serta dokumen demi memahami kompleksitas fenomena sosial secara sistematis. Alur analisis yang digunakan merujuk pada model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mengolah data secara terus-menerus dari awal pengumpulan data hingga penelitian selesai melalui tiga tahap utama. Analisis ini dimulai dengan reduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilah, dan membuang informasi yang tidak relevan agar analisis tetap fokus, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk menunjukkan pola dan hubungan antarvariabel secara terencana, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk merumuskan intisari dan makna akhir dari data berdasarkan bukti empiris yang sah di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas sosial Kota Tanjungpinang adalah unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. (Safitri dkk (2018) Salah satu pihak pemerintah yang menangani masalah-masalah sosial adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Lembaga ini terbagi menjadi tiga bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, serta Rehabilitasi Sosial yang masing-masing berfungsi memetakan pelayanan masyarakat, termasuk penanganan ODGJ. Bidang Rehabilitasi Sosial berperan sebagai pelaksana teknis yang bertugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi pelayanan. Upaya ini dilakukan agar individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami disfungsi sosial dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Guna menangani fenomena ODGJ (baik yang berkeluarga maupun terlantar) di Kota Tanjungpinang, Bidang Rehabilitasi Sosial memberikan pelayanan terpadu mulai dari identifikasi hingga reintegrasi sosial. Mengingat penanganan ini tidak dapat dilakukan secara sektoral, lembaga menerapkan pendekatan multidisiplin melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan masyarakat, pihak kelurahan, puskesmas, rumah sakit jiwa, serta instansi terkait lainnya.

Untuk menganalisis efektivitas penanganan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Peran (Role Theory) dari Soerjono Soekanto 2009. (Soekanto dalam Nurjana dkk 2025), memandang peran sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menangani ODGJ di Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 akan dinilai secara mendalam melalui tiga dimensi peran menurut Soekanto yaitu: peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif.

Peran aktif

Peran aktif adalah aksi nyata yang dilaksanakan oleh sebuah badan dalam menyelenggarakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Pada penelitian ini peran aktif bidang rehabilitasi sosial nampak dari semua rancangan dan pekerjaan yang secara langsung di arahkan kepada Odgj. Langkah awal yang dilakukan bidang rehabilitasi sosial ialah pendataan dan identifikasi terhadap Odgj yang ada di kota Tanjungpinang. Pendataan dilaksanakan lewat laporan masyarakat, pemerintah kelurahan, Satpol PP, maupun hasil penemuan lapangan.

1. Pendataan dan Identifikasi OdgJ

Proses pendataan dan identifikasi adalah tindakan awal Bidang Rehabilitasi Sosial dalam menemukan, mengenali, dan mencatat ODGJ sebagai wujud pemenuhan hak warga negara. Hasil pendataan menjadi dasar intervensi sosial, sedangkan identifikasi berfungsi untuk memahami situasi kejiwaan, tingkat keparahan, kondisi keluarga, serta kebutuhan layanan pasien.

Langkah awal yang telah berjalan adalah mendata dan mengenali ODGJ di wilayah Kota Tanjungpinang. Pendataan ini dilakukan secara aktif berdasarkan laporan dari masyarakat, pihak kelurahan, Satpol PP, serta hasil penjangkauan langsung di lapangan. Proses ini masih menghadapi kendala di lapangan, seperti keterbatasan jumlah petugas aktif, kurangnya kepedulian masyarakat untuk melapor, serta tingginya mobilitas ODGJ yang menyulitkan petugas dalam memperbarui data secara berkala.

Berikut data pasien ODGJ tahun 2024 yang sudah ditangani Bidang Rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang:

NO	NAMA	TEMPAT LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT ASAL
1	Hendry Chandra	Kisaran	Laki-Laki	Perum Tinur Indah Kp. Bukit Asri
2	Linda	Singkarang	Perempuan	Perum Taman Harapan Indah
3	Nola Yolanda	Kota Kaciak	Perempuan	Jl. Bintang No. 16
4	Intan/Rosmiati	Tanjungpinang	Perempuan	Jl. Gatot Subroto
5	Sutikno Suprianto	Tanjungpinang	Laki-Laki	Kp. Bangun Rejo
6	Musmuliadi	Torok Aik Belek	Laki laki	Batu Jangkih II
7	Raja Afreza Kurniawan	Tanjungpinang	Laki laki	Jl. Sulaiman Abdullah No. 11
8	Lina Bong	Dabo Singkep	Perempuan	Perum Bintang Center Blok O No. 35
9	Bun Khiem	Tanjungpinang	Laki-Laki	Jl. Tambak No. 29
10	M. Zulfikar Yuvis	Tanjungpinang	Laki laki	Jl. IR. Sutami No. 32 F
11	Jepri	Kijang	Laki-Laki	Jalan Citra Gang Citra II No. 3 B
12	Yopa Rizal	Tanjungpinang	Laki-Laki	Perum Griya Bestari Blok I No. 8
13	Rahila	Karimun	Perempuan	Jl. Sei Serai
14	Setiawati	Tanjungpinang	Perempuan	Jl. Brigden Katamso
15	Enung Nurhaetin	Purwakarta	Perempuan	Perum Alam Tirta Lestari No. 1

2. Penjangkauan dan penanganan

Peran aktif selanjutnya diberikan lewat aksi penjangkauan terhadap odgJ yang ada di jalan, fasilitas umum dan lingkungan masyarakat. penjangkauan dilaksanakan oleh bidang rehabilitasi sosial berkoordinasi dengan instansi lain dalam memberikan pelayanan sosial dan mencegah dampak yang membahayakan diri odgJ maupun masyarakat sekitar di kota Tanjungpinang. Berdasarkan fakta lapangan bidang rehabilitasi melakukan pendekatan persuasif, asesmen dan evakuasi terhadap odgJ. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan petugas lapangan sehingga bidang rehabilitasi sosial kebanyakan lebih mendapat laporan masyarakat atau Satpo PP dibandingkan temuan langsung. Selain itu masih di temukan odgJ berkeliaran di tempat umum, dari sana dapat lihat bahwa koordinasi antara bidang rehabilitasi dengan satpo pp dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi.

3. Rujukan dan Fasilitas Pelayanan

Penanganan medis ODGJ merupakan proses pengarahan dan pendampingan pasien ke pelayanan kesehatan jiwa yang sesuai berdasarkan hasil asesmen. Dalam pelaksanaannya, Bidang Rehabilitasi telah mendampingi proses evakuasi serta alur rujukan berjenjang mulai dari Puskesmas hingga RSUD, sekaligus berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melacak identitas pasien yang ditempatkan sementara di rumah singgah Dinsos selama maksimal 14 hari sesuai SOP. Kendati demikian, pelayanan ini masih menghadapi tantangan berupa lamanya waktu pelacakan identitas serta keterbatasan kapasitas ruangan di RSJKO Uban yang harus menampung pasien rujukan dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, penguatan sinergi birokrasi dan pengembangan kapasitas fasilitas kesehatan jiwa regional menjadi poin krusial agar hambatan rujukan ini dapat segera teratasi dengan efektif.

4. Rehabilitasi dan Pemulihan Fungsi Sosial

Rehabilitasi sosial bertujuan mengembalikan kemampuan fungsi sosial ODGJ agar dapat hidup wajar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dimana rehabilitasi sosial adalah serangkaian kegiatan terencana untuk mengembalikan fungsi diri seseorang untuk menghadapi kendala fisik, mental, maupun sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik (Jeddawi, M. (2025).

Upaya yang telah dilakukan meliputi bimbingan, konseling, pendampingan keluarga, pelatihan keterampilan sederhana, motivasi, hingga reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh rangkaian program ini terbukti memberikan manfaat positif dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial ODGJ. Proses ini tidak sekadar berfokus pada kesembuhan fisik, melainkan juga bertujuan memperkuat rasa percaya diri, keterampilan bersosialisasi, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial di tengah keluarga dan masyarakat. Meskipun demikian keberhasilan rehabilitasi sangat dipengaruhi oleh pelayanan medis, dukungan keluarga dan kepatuhan terhadap pengobatan.

Peran Partisipatif

Peran partisipatif bidang rehabilitasi sosial sangat penting dalam penanganan ODGJ di Kota Tanjungpinang melalui kegiatan penjangkauan, pendampingan, dan edukasi. Peran aktif ini membuktikan bahwa lembaga tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, melainkan terlibat langsung dalam proses pelayanan. Wujud nyata kepedulian tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagai tim gerak cepat di lapangan dalam menangani ODGJ.

TRC dibentuk oleh Dinas Sosial sebagai ujung tombak pelayanan lapangan untuk menangani permasalahan darurat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), termasuk ODGJ, secara cepat. Tim ini berperan aktif melakukan penjangkauan, asesmen awal, evakuasi, dan koordinasi penanganan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, TRC mengintegrasikan kerja sama lintas sektor yang terdiri dari Dinas Sosial, Satpol PP, Disdukcapil, Dinas Kesehatan, serta pihak kecamatan dan kelurahan.

1. Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Penangan Odgj membutuhkan kerjasama lintas sektor. Oleh karena itu, bidang rehabilitasi sosial menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah sakit, Baznas, Satpol PP, Kecamatan dan Kelurahan, dan Organisasi Sosial. Koordinasi dilaksanakan dalam proses penjangkauan, rujukan, rehabilitasi, hingga pemulangan Odgj kepada keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi menjadi salah-satu faktor penting dalam keberhasilan penangan Odgj. Namun, dalam prakteknya Bidang rehabilitasi sosial menghadapi kendala komunikasi, keterbatasan anggaran dan efektivitas kolaborasi. Hal ini menunjukkan tanpa koordinasi dan kolaborasi lintas sektor fase rehabilitasi dan pemulihan sosial akan sulit dilaksanakan secara efektif.

2. Pelibatan Keluarga Dalam Rehabilitasi

Keluarga berperan penting dalam pemulihan ODGJ, sehingga Bidang Rehabilitasi Sosial selalu melibatkan mereka dalam pendampingan pengobatan, pengawasan obat, dukungan psikologis, hingga penerimaan kembali pasien. Namun, petugas kerap menghadapi kendala berupa adanya keluarga yang mengabaikan perannya atau menolak mengurus kembali pasien setelah rehabilitasi. Padahal, dukungan penuh keluarga sangat memengaruhi keberhasilan pemulihan dibandingkan dengan ODGJ yang terlantar.

3. Edukasi Dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Stigma dan pandangan negatif masyarakat seperti menganggap ODGJ berbahaya, aib, atau pengganggu ketertiban adalah tantangan utama yang menghambat keberhasilan penanganan ODGJ. Guna mengatasi hal ini, edukasi dan sosialisasi sangat penting dilakukan untuk mengurangi diskriminasi, meningkatkan kesadaran, serta mendorong partisipasi publik dalam pelaporan dan penanganan pasien.

Sebelum pandemi, sosialisasi kepada masyarakat rutin digelar 3 hingga 4 kali setahun. Namun pada tahun 2024, akibat dampak pasca-Covid-19 dan adanya efisiensi anggaran, intensitasnya menurun sehingga edukasi hanya diberikan secara langsung kepada pihak keluarga saat petugas melakukan pendampingan pasien. Kondisi ini membuat edukasi menjadi kurang efektif karena hanya berfokus pada keluarga, padahal masyarakat umum di Kota Tanjungpinang juga membutuhkan pemahaman yang sama. Meskipun stigma negatif masih ditemukan di lapangan, evaluasi menunjukkan bahwa upaya edukasi yang berjalan tetap berkontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara bertahap.

Menurut Soerjono Soekanto peran partisipatif terlihat dari kemampuan suatu badan membangun relasi kolaborasi dengan berbagai pihak, hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan peran partisipatif melalui koordinasi lintas sektor, pelibatan keluarga dan edukasi dan sosialisasi. Meskipun masih disertai dengan berbagai kendala.

Peran Pasif Bidang Rehabilitasi Sosial Dalam Menangani ODGJ

Peran pasif adalah peran yang tidak dilakukan oleh personal, maknanya peran pasif hanya dimanfaatkan sebagai simbol dalam kondisi kehidupan masyarakat tertentu. Peran pasif dalam teori Soerjono Soekanto merujuk pada fungsi menjaga stabilitas sosial melalui penyusunan kebijakan, pengawasan dan pengendalian.

1. Penyusunan mekanisme pelayanan

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas dalam memastikan pelayanan terhadap Odg berpedoman dengan ketentuan yang ada. Hal ini dilakukan melalui penyusunan prosedur pelayanan, standar operasional, serta mekanisme koordinasi dengan instansi lain. eksistensi mekanisme pelayanan memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas sosial sehingga proses penanganan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan temuan lapangan mekanisme penanganan ODGJ berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi masing-masing.

2. Pengawasan dan monitoring

Pengawasan dan monitoring sangat penting untuk memantau perkembangan kondisi ODGJ, mencegah kekambuhan, menilai efektivitas rehabilitasi, serta mengidentifikasi kebutuhan lanjutan pasien. Dalam praktiknya, Bidang Rehabilitasi Sosial telah melakukan pengawasan selama pasien menjalani pengobatan di Rumah Sakit. Namun, monitoring pasca-rehabilitasi setelah pasien dipulangkan ke domisili sudah tidak berjalan. Batasan intensitas pengawasan ini terjadi akibat kendala jarak dan keterbatasan anggaran yang dihadapi petugas di lapangan.

3. Pengendalian dan pencegahan permasalahan sosial

Peran pasif lain seperti menjaga kondisi sosial masyarakat agar tetap kondusif. Dalam aspek ini bidang rehabilitasi sosial berusaha mencegah adanya kesenjangan sosial yang diakibatkan oleh ketidak efektifan penanganan ODGJ. Hal ini dapat dilakukan dengan koordinasi, edukasi, monitoring berkelanjutan sehingga eksistensi ODGJ tidak melahirkan konflik sosial maupun gangguan ketertiban publik.

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto peran pasif bidang rehabilitasi sosial ditunjukkan dalam fungsi regulasi dan pengawasan. Meskipun tidak secara langsung dilapangan akan tetapi fungsi ini sangatlah penting karena menjadi dasar keberlangsungan program rehabilitasi sosial. Akan tetapi penelitian ini melihat bahwa efektifitas peran pasif masih sangat dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya baik personel maupun anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kota Tanjungpinang telah menjalankan ketiga indikator peran diatas, sebagaimana di kemukakan oleh Soerjono Soekanto yakni peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif dilihat dengan pelaksanaan pendataan, penjangkauan, asesmen, rujukan dan rehabilitasi sosial melalui kolaborasi Dinkes dan RSJKO yang berada di uban. Peran partisipatif dilihat dari kolaborasi lintas sektor, pelibatan keluarga, serta edukasi masyarakat. seterusnya peran pasif dilihat melalui penyusunan mekanisme pelayanan, pengawasan, monitoring dan pengendalian sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas masih ditemukan beberapa penghambat seperti pasien tidak memiliki identitas, kurangnya dukungan dari keluarga terhadap pasien ODGJ, keterbatasan jumlah pandamping lapangan, keterbatasan anggaran, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya kepedulian masyarakat, dan masih adanya stigma masyarakat terhadap penderita ODGJ. Faktor inilah yang membuat penanganan ODGJ tidak sepenuhnya optimal.

Secara teoritis temuan ini menjelaskan pandangan Soerjono Soekanto bahwa keberhasilan suatu badan dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh kualitas melakukan fungsi aktif, partisipatif, dan pasif secara seimbang. Dalam aspek penanganan ODGJ di kota Tanjungpinang tahun 2024 bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan peran dengan baik, akan tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek kuantitas petugas lapangan, koordinasi lintas sektor, edukasi dan sosialisasi, sarana dan prasarana dan Anggaran tujuannya penanganan ODGJ dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, Y. A. (2021). *Peran Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial (Dinas Sosial) Dalam Penanganan Anakjalanan di Kota Samarinda*. Ejournal Sosiatri-Sosiologi, 9(1), 78–91.
- Bangsu, T. (2022). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Bidang Sosial Terkait Penanganan Masalah Gangguan Jiwa*. Jurnal Borneo Akcaya, 8(1), 35–46.
- Dwiyanto, A. *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik UGM, 1(2).
- Jeddawi, M. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Kabupaten Aceh Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Karim, M. S. (2016). *Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) dalam Pembinaan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Malinau*.
- Karvallo, M. F. E., Rochim, A. I., & Ismail, H. (2025). *Implementasi Program Rehabilitasi bagi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Dinas Sosial Kabupaten Ende*. PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469), 5(03), 169–179.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*.
- Safitri, D., Hidayat, M. T., & Sutarjo, M. (2018). *Koordinasi Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan dan Desa dalam Program Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon*. *Jurnal Ilmiah Publika*, 6(2).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tenri, A. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar*. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179–186.
- Wahyuni, A., Hartanto, R. V. P., & Nuryadi, M. H. (2021). *Rehabilitasi Sosial bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Telantar melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia Kota Surakarta*. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(1).
- Winarni, E. W. (2021). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Bumi Aksara.
- Zizi, A. A. (2023). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Karimun*. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(1).